

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Afandi, 2018:83).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang

berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayati, 2014).

Kinerja pemerintah daerah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kepastian mereka saat ini yang diperlakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Suryoto dan Burhanuddin, 2011:34)

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat

rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Subang.

Fenomena yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada kabupaten Subang yaitu berdasarkan hasil evaluasi Kementrian PAN-RB Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019, Kabupaten Subang Perolehan predikat 'B' dalam penilaian tersebut masih terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dan 8 indikator kinerja yang memperoleh kategori tidak tercapai dalam bidang : 1. Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan 2. Persen Ketersediaan Rumah Layak Huni 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Nilai Investasi PMDN 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan 8. Indeks Resiko Bencana.

Fenomena lainnya yaitu terjadi pada tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti piutang Pemkab Subang di pihak ketiga. Masalah ini menjadi catatan BPK terhadap keuangan daerah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Ahmad Sobari mengatakan sehubungan dengan akan diperiksanya Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang oleh BPK, tercantum dalam laporan tersebut piutang pajak yang menjadi catatan BPK dari tahun ke tahun. Pada tahun sebelumnya, BPK sudah mengingatkan jika piutang tidak ada progres akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian WTP salah satunya dinilai dari kesungguhan upaya pemerintah daerah terhadap persoalan piutang pajak.

<https://www.tintahijau.com/pemerintah/eksekutif/25867>

Fenomena lain terkait kinerja pemerintah yang penulis kutip dari kota subang.com yaitu di usianya yang sudah menginjak 69 tahun, Subang telah mengalami perkembangan di berbagai bidang. Namun masih banyak pula berbagai kekurangan dari Pemerintah Kabupaten Subang yang dirasakan belum memuaskan masyarakat Subang. Ironisnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga jauh lebih rendah dari rata-rata IPM di Jawa Barat, yang berada di angka 70,69. Sementara IPM Kabupaten Subang pada 2017 ialah 67,73. Pembangunan infrastruktur juga dapat dikatakan jauh dari harapan yang diinginkan, dari data Dinas PUPR dari 1.054,50 km total panjang jalan, kondisi jalan yang rusak sekitar 38,9% atau sekitar 400 km masih rusak, didapatkan hasil bahwa masyarakat Subang dalam segi kinerja pemerintah, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masih dibawah harapan yang masyarakat inginkan. Di samping itu juga masyarakat di Kabupaten Subang juga masih relatif kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran terbuka di daerah tersebut juga masih cukup tinggi.

<https://www.kotasubang.com/10265/kinerja-pemkab-subang>

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditelaah bahwa kinerja pemerintah daerah subang masih belum optimal, yang berkaitan dengan hasil (*outcome*), keluaran (*output*) dan manfaat (*benefit*).

Sistem pengendalian internal pemerintah juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem penegndalian internal yang dapat mengatur perilaku para karyawan di dalam perusahaan sehingga para kayawan tidak akan bertindak yang dapat merugikan perusahaan. Sistem pengndalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengndalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Semakin baik SPIP dipahami dan dilaksanakan maka semakin baik pula kinerja aparatur pemerintah (Garcelia Makatengkeng, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel, 2021). Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengndalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan unsur penting dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahka, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi pemerintah (Azlina, 2019). Dengan adanya pengndalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Dadang, 2014).

Kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi dan menjalankan tugas untuk meningkatkan kinerja individual (Astuti dan Dharmadiaksa, 2014). Kebutuhan tugas harus sesuai dengan kemampuan individu yang didukung dengan fungsi-fungsi teknologi informasi (Lindawati dan Irma, 2012). Masalah yang sering muncul ketika karyawan tidak memanfaatkan teknologi yang disediakan secara maksimal dalam membantu penyelesaian tugas, sehingga teknologi kurang memberikan manfaat. Oleh sebab itu, evaluasi pemakaian digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan kecocokan tugas-tugas dengan teknologi (Marlinawati dan Suaryana, 2013).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Doni Putra Utama (2020) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Karimun dan Muhammad Arif Rabbni (2021) dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi, *Task Technology Fit*, Kompetensi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Telkom Regional VI Kalimantan Unit Regional Opration Center Balikpapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kesesuaian Tugas Teknologi (*Task Technology Fit*) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang
2. Bagaimana kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) pada pemerintah daerah Kabupaten Subang
3. Bagaimana kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang
4. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang
5. Seberapa besar pengaruh kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang

6. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang

I.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal dan kesesuaian tugas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Subang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Subang.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) terhadap kinerja pemerintah daerah.

I.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

I.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan serta referensi dalam penelitian bidang ekonomi khususnya akuntansi, terutama mengenai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kesesuaian Tugas Teknologi (*Task Technology Fit*) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

I.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara teori maupun kondisi nyata di lapangan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kesesuaian Tugas Teknologi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan sistem pengendalian internal

pemerintah dan kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kesesuaian tugas teknologi (*task technology fit*) terhadap kinerja pemerintah daerah.

I.5 Lokasi dan Waktu

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Soklat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti.